

Judul : Kinerja DPR terganggu
Tanggal : Rabu, 12 April 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Kinerja DPR Terganggu

● FAUZIAH MURSID,
DEA ALVI SORAYA

Setya Novanto siap bekerja sama dengan KPK.

JAKARTA — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifuddin Sudding menilai, pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) oleh KPK akan mengganggu kerja DPR. Hal ini terkait posisi Setnov sebagai ketua DPR dalam hubungannya ke parlemen lintas negara.

"Ya, saya kira ini sangat mengganggu ya, apalagi dalam posisi ketua DPR dalam hubungan parlemen di lintas negara. Tapi, saya kira akan dicermati proses penanganan kasus oleh beliau," ujar Sudding di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4).

Ia mengaku, MKD hingga saat ini belum menerima informasi terkait pencegahan Novanto oleh penyidik KPK tersebut. Meski demikian, MKD akan tetap menghormati proses yang berlangsung sembari menunggu perkembangan kasus yang menjerat ketua umum Partai Golkar tersebut.

Begitu pun berkaitan laporan pe-

ngaduan yang masuk ke MKD atas nama Novanto. MKD telah menyepakati akan menunggu proses hukum kasus dugaan KTP-el berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

"Kami rapat internal MKD dan kita menyepakati sudah sejalan tata tertib di MKD ini. Proses hukum kita tunggu penanganannya. Kalau sudah ada keputusan lembaga peradilan, MKD akan bersikap," kata sekretaris jenderal Partai Hanura tersebut.

Sementara, Ketua DPR Setya Novanto mengaku baru mengetahui perihal pencegahan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Meski begitu, ia mengaku siap bersikap kooperatif kepada KPK terkait proses pengusutan perkara kasus dugaan korupsi KTP-el.

"Tentu saya menghargai dan saya siap kapan pun diundang atau dipanggil oleh KPK karena ini adalah proses hukum yang harus saya patuhi dan saya setiap saat selalu siap untuk diundang," kata Setnov.

"Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dicegah bepergian keluar negeri untuk enam bulan ke depan," kata Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie ketika dikonfirmasi Antara di Jakarta, Selasa (11/4) pagi.

"Sudah sejak kemarin malam, Senin (10/4), Dirjen Imigrasi menerima surat permintaan pencegahan untuk tidak bepergian keluar negeri

atas nama Bapak Setya Novanto dan langsung dimasukkan dalam sistem informasi dan manajemen keimigrasian untuk berlaku selama enam bulan," katanya. Tapi, Ronny tidak menjelaskan apakah permintaan pencegahan itu juga membuat status Setnov sebagai tersangka atau masih jadi saksi dalam penyidikan kasus di KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan itu diajukan karena KPK merasa Novanto dibutuhkan keterangannya terkait kasus itu. Dengan pencegahan itu, KPK akan lebih mudah meminta keterangan Novanto.

"Saksi yang dicegah tentu dibutuhkan keterangannya. Dan untuk mengefektifkan penyidikan agar saat akan diperiksa sedang berada di Indonesia," ujar Febri.

Tokoh muda Golkar Ahmad Doli Kurnia menganggap pencegahan Setnov merupakan sinyal dari KPK bahwa mereka telah memiliki cukup bukti atas keterlibatan SN dalam kasus megaskandal korupsi KTP-el. Menurut Doli, dengan situasi seperti itu, bagi Partai Golkar tidak ada pilihan lain selain segera konsolidasi mengambil langkah antisipasi hingga kemungkinan terburuk, bila tidak ingin selalu dibawa-bawa, menjadi bulan-bulanan, dan dikaitkan dengan kasus tersebut secara institusi.

"Beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan bahwa seluruh *stakeholder* partai harus sudah bisa duduk bersama membicarakan kasus yang sedang dihadapi oleh Ketua Umum, termasuk sampai membicarakan perlunya kepemimpinan baru baik sementara maupun permanen. Sekarang tingkat keseriusannya harus semakin tinggi. Opsi langkah-langkahnya pun harus semakin konkret," ujar Doli, Selasa (11/4).

Jika merujuk pada perkembangan sidang dan langkah yang diambil KPK, dia mengatakan, pembicaraan yang dilakukan pada tingkat pimpinan partai sudah harus lebih tegas. Pergantian kepemimpinan, tambah dia, sudah hampir bisa dikatakan bukan lagi menjadi opsi, melainkan keharusan.

"Tinggal pilihannya sementara atau permanen. Bila yang dipilih adalah pergantian sementara, ya segera lah dilakukan. Atau bila pilihannya pergantian secara permanen, maka *step-step*-nya pun harus dipersiapkan," ungkap dia. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Doli berpendapat, yang terpenting adalah tidak terciptanya kegaduhan, konflik, dan dapat dukung oleh semua pihak demi menjaga konsolidasi agenda dan program serta menyelamatkan partai.

■ ed: muhammad hafid